

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kemajuan teknologi dan budaya telah mendorong perubahan pada struktur sosial keseluruhan termasuk didalamnya bidang perekonomian. Perekonomian modern secara tidak langsung menuntut perusahaan maupun para pengusahanya beradaptasi dengan keadaan untuk dapat terus mempertahankan eksistensinya di dunia bisnis, hal ini berlaku bagi seluruh organisasi ataupun individu yang terlibat dalam kegiatan perekonomian tidak terkecuali bagi para pelaku usaha di sektor-sektor informal atau lebih biasa disebut UMKM (Usaha Menengah Kecil Micro). Perubahan yang umum harus diadaptasi adalah antara lain perubahan sistem organisasi, sistem pemasaran, sistem keuangan, dan sistem operasional. UMKM sebagaimana kita ketahui telah menjadi salah satu pendorong penting dalam membangun kekuatan ekonomi negara indonesia.

UMKM menjadi salah satu sektor bisnis yang menjadi pilihan mayoritas masyarakat karena struktur bisnis yang tidak terlalu membutuhkan modal yang tinggi, disamping itu struktur pasar yang tidak terlalu dinamis menjadikannya cukup aman untuk dimasuki. Tetapi rendahnya kualitas sumber daya manusia selaku pelakunya masih rendah, menyebabkan sektor ini menjadi sektor yang seolah-olah jalan di tempat. Tentu saja hal ini tidak terjadi pada semua pelaku UMKM. Untuk itulah segala kegiatan terkait dengan upaya pengembangan sektor informal ini perlu terus digalakkan, yang salah satunya ada pada perbaikan kompetensi sumber daya manusianya.

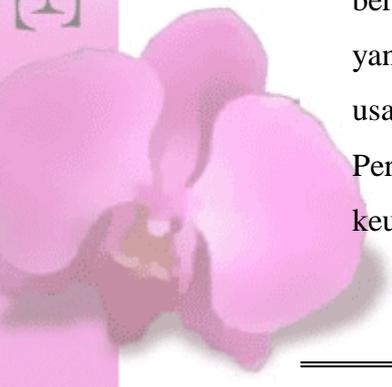
Hasil dari beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa, faktanya para pelaku UMKM di Indonesia selain terkendala modal juga terkendala terkait masalah manajerial yang kurang mumpuni. Karena memang sejatinya sektor ini banyak digeluti oleh masyarakat dari kalangan menengah ke bawah yang *notabene* mereka tidak memiliki bekal ilmu dan keterampilan



yang memadai untuk melakukan sistem pembukuan yang baik dan benar. Pada akhirnya banyak dari para pelaku UMKM yang hanya melakukan metode pembukuan sederhana yang terkesan ala kadarnya dan cenderung mengabaikan kaidah-kaidah laporan keuangan yang baku. Akibat dari adanya hal tersebut adalah timbul kemungkinan bahwa data diatas kertas yang mereka miliki tidaklah sesuai dengan kondisi keuangan riil mereka, sehingga hal ini akan memberikan dampak langsung bagi kelangsungan bisnis mereka suatu saat nanti. Salah satu kesulitan yang mungkin akan mereka hadapi suatu saat nanti adalah sulitnya memenuhi syarat pengajuan kredit pada pihak perbankan, karena dengan tidak adanya laporan keuangan yang baku maka kemungkinan proses kredit akan menjadi sedikit sulit untuk dilakukan. Tetapi dengan akuntansi yang memadai maka pengusaha UMKM dapat memenuhi persyaratan dalam pengajuan kredit, seperti pembuatan laporan keuangan.

Standart Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Public (SAK ETAP) merupakan standart akuntansi yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK umum, sebagian besar menggunakan konsep biaya historis, mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh UMKM, bentuk pengaturan lebih sederhana dalam hal pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, juga relatif tidak berubah selama beberapa tahun. SAK ETAP merupakan salah satu bentuk kontribusi profesi akuntan untuk mendukung penguatan dan pengembangan ekonomi nasional yang berbasis pada kekuatan usaha kecil, menengah, dan koperasi.(SAK ETAP,xi)

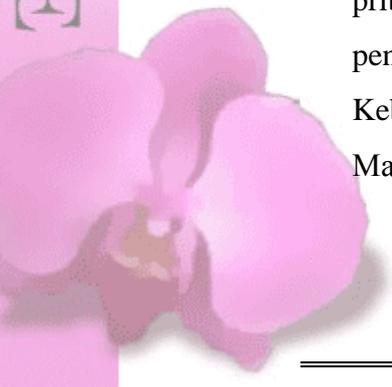
Penggunaan SAK ETAP ditinjau dari manfaat teoritis yang dapat dinikmati oleh masyarakat pelaku UMKM merupakan salah satu sarana yang cukup berguna bagi kinerja UMKM. Tetapi hal tersebut berkontradiksi dengan fakta yang terdapat di lapangan. Karena dalam beberapa kasus, terdapat pelaku usaha cenderung enggan untuk melakukan proses pencatatan transaksi. Persepsi sebagian besar para pelaku UMKM adalah bahwa pencatatan keuangan usaha merupakan hal yang rumit dan membutuhkan waktu yang



tidak sedikit. Budaya praktis telah seakan-akan melekat dan mendarah daging dipikiran masyarakat Indonesia secara umum sebagai pelaku kegiatan usaha.

Metode yang digunakan oleh tiap-tiap pelaku usaha yang masih awam ini cukup beragam. Beberapa orang melakukan proses pembukuan sederhana, tetapi tanpa memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha. Dampak fatal dari perilaku pembukuan yang seperti demikian adalah banyak dari para pelaku usaha akhirnya terpaksa gulung tikar karena bisnis mereka kekurangan likuiditas akibat kelalaian pemakaian uang usaha untuk keperluan pribadi. Untuk menyikapi hal tersebut selain dibutuhkan kebijaksanaan dalam pengelolaan uang usaha juga secara mutlak haruslah dilakukan pencatatan yang memisahkan setiap transaksi yang terjadi. Selain dari permasalahan di atas, masih banyak lagi problematika kompleks yang dihadapi masyarakat pelaku kegiatan UMKM.

Penelitian inipun dilakukan atas dasar masalah-masalah tersebut, dan menguji dampak positif bagi subjek maupun objek dalam penelitian terkait dengan metode pembukuan yang baku atau SAK ETAP dibandingkan sebelumnya. Menggunakan objek penelitian yang sebelumnya tidak pernah mendengar atau bahkan mengetahui tentang adanya dan pentingnya metode pembukuan bagi suatu kegiatan usaha agar dapat memunculkan reaksi yang murni. Selain itu opini dari subjek penelitian juga tidak kalah pentingnya untuk menentukan dibutuhkan atau tidaknya SAK ETAP bagi kegiatan usaha tersebut. Karena memang pada akhirnya digunakan atau tidaknya SAK ETAP untuk pedoman penyusunan laporan keuangan kegiatan usaha tersebut adalah sepenuhnya menjadi hak bagi pelaku usaha tersebut, yang dinilai secara objektif dan pribadi setelah penyesuaian berdasarkan pada manfaat yang dirasakan setelah penerapan SAK ETAP. Maka penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat Kebutuhan SAK ETAP Pada UMKM (Studi Kasus Pada Toko 18 Mergan Malang)”.



1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana identifikasi laporan keuangan sebelumnya pada UMKM dan apa kendalanya?
2. Bagaimana mengimplementasikan model SAK ETAP pada UMKM?
3. Seberapa besar tingkat kebutuhan UMKM menggunakan SAK ETAP tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi laporan keuangan sebelumnya pada UMKM dan mengetahui kendalanya.
2. Untuk mengimplementasikan model SAK ETAP pada UMKM.
3. Untuk mengetahui tingkat kebutuhan SAK ETAP pada UMKM.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Membantu pelaku UMKM dalam mengidentifikasi laporan keuangan yang telah diterapkan selama ini dan mengetahui kendalanya.
2. Menyusun implementasi model SAK ETAP pada UMKM.
3. Memberi informasi tingkat kebutuhan SAK ETAP pada UMKM

